

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pemerintah sebagai alat penyelenggara negara mempunyai kewajiban memberikan layanan kepada publik, dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Pelayanan informasi adalah salah satu hak yang dimiliki publik sebagai akses untuk mendapatkan informasi tentang berbagai produk pemerintah dan laporan tentang program pemerintahan yang telah dilakukan. Hal ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mengatur hak warga negara dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak tersebut, terkecuali beberapa informasi yang bersifat rahasia dan terbatas sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan yang lebih besar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 definisi informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 18 Tahun 2008 pasal 3 bagian (b) menyatakan bahwa, “Kesempatan warga negara dalam mendapatkan informasi bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik”. Dilanjutkan pada bagian (c) disebutkan, “untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik”. Berdasarkan kedua sub pasal yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa lembaga negara harus mampu menyediakan sarana bagi publik untuk dapat mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang tercantum dalam bab IV pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa, “Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di lingkungan badan publik negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik”. Dilanjutkan dalam pasal 13 ayat (1) yang berbunyi, “PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi”. Dalam lingkungan pemerintahan divisi yang berkompetensi menjalankan peran dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi adalah bagian hubungan masyarakat (Humas).

Peran humas dalam dunia pemerintahan sangatlah sentral, humas berperan sebagai jembatan penghubung antara pihak pemerintah dengan publiknya, hubungan kedua pihak tersebut harus berjalan dengan harmonis agar menciptakan suasana yang kondusif dalam rangka membangun dan mencapai tujuan negara,

demikian terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tanpa rakyat yang terinformasi dan aktif, pejabat-pejabat terpilih yang diangkat dapat kehilangan hubungan dengan pemberi suara mereka.

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang prima maka dibutuhkan banyak faktor yang harus dipersiapkan, mulai dari sumber daya manusia, yaitu baik dari pihak lembaga pemerintah sebagai fasilitator dan eksekutor pelayanan informasi, maupun dari pihak pemohon yang dituntut mempunyai tanggung jawab dalam penggunaan informasi secara bijaksana. Selain itu media penghubung antara pihak pelayan dan pihak pemohon informasi harus mudah dijangkau oleh semua kalangan, sesuai dengan Undang-Undang KIP pasal 2 ayat (3) yang berbunyi, “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”.

Penggunaan fasilitas internet adalah salah satu solusi dari Undang-Undang KIP pasal 2 ayat (3) yang telah disebutkan sebelumnya, internet yang dapat diakses oleh siapa saja menjadikan media ini banyak digunakan oleh lembaga pemerintah dalam merangkul publik sebagai pemangku kebijakan tertinggi. Website adalah salah satu jenis fasilitas dalam internet yang paling banyak digunakan, karena dapat memuat berbagai macam konten seperti tulisan, gambar, suara maupun video, sehingga sangat mendukung dalam proses penyebarluasan informasi.

Penggunaan internet atau sering juga disebut dengan media baru yang semakin masif, dilakukan oleh berbagai tingkatan pemerintahan demi mewujudkan

e-Government. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, memerintahkan kepada pemerintah setingkat Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-Government* secara nasional.

Dalam praktek menjalankan *e-Government* ada berbagai macam sarana yang digunakan, salah satunya adalah website (situs) sebagai salah satu media yang dapat menjangkau publik secara masif, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Informasi Publik, pada pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa “Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui situs resmi (website) dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat”. Hal tersebut juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 152 ayat (3) yang menyatakan “Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional”.

Kabupaten Kendal adalah salah satu daerah yang menggunakan media internet sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan *e-Government*, berdasarkan data pemeringkatan *e-Government* Indonesia lingkup wilayah Jawa Tengah yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2012 dan 2014, Kabupaten Kendal selalu mampu menempati posisi 10 besar, namun yang menjadi catatan adalah penurunan hasil di tahun 2014, jika di tahun 2012 Kabupaten Kendal menduduki posisi lima, di tahun 2014 justru turun dua peringkat dengan menempati posisi tujuh. Hal ini tentu sebuah pertanda penurunan kualitas pemerintahan ditengah tuntutan publik yang semakin sadar akan pelayanan yang seharusnya mereka dapatkan, termasuk pelayanan informasi melalui media website.

Website Kabupaten Kendal adalah salah satu sarana yang digunakan untuk memuat berbagai macam informasi, yang berkaitan dengan produk maupun kegiatan pemerintahan, sebagai wujud transparansi pemerintah Kabupaten Kendal pada masyarakat. Sarana komunikasi yang berfungsi sebagai wajah Kabupaten Kendal di dunia maya ini merupakan salah satu program pemerintah yang digunakan sebagai jalan penghubung dengan masyarakat, karena selain dapat dimanfaatkan sebagai media pemberitaan, website juga menyediakan fasilitas kolom tanggapan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan komunikasi dua arah. Pada tahun 2012 website Kabupaten Kendal berhasil meraih juara satu kategori pelayanan informasi melalui internet/website dalam lomba Anugerah

Media Humas (AMH) yang berlangsung di Kota Makassar, hal ini menjadi indikator bahwa pada tahun 2012 www.kendalkab.go.id telah dikelola dengan baik menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sedangkan untuk kriteria pemenang pelayanan informasi melalui internet (website) berdasarkan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Desain

- a. Proporsi dan komposisi tata letak/tampilan;
- b. Kemudahan dan kenyamanan menu serta navigasi;
- c. Waktu muat halaman (loading time)

2. Kebermanfaatan Konten

- a. Terbaharukan secara berkala dan dinamis;
- b. Kontekstual - bermanfaat dan mudah dipahami, sesuai dengan visi dan misi institusi, selaras dengan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik.

3. Interaktivitas Komunikasi

- a. Pemanfaatan fitur interaksi (media sosial, forum terintegrasi);
- b. Tingkat interaktivitas (informasi satu arah vs dialog).

Gambar 1

Daftar pemenang lomba AMH tahun 2012

DAFTAR PEMENANG ANUGERAH MEDIA HUMAS 2012

LAPORAN KERJA HUMAS

Penda Kabupaten & Propinsi

Pemenang	Laporan Kerja Humas
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2	Pemerintah Kabupaten Serang
3	Pemerintah Kabupaten Kuta Kalimantan

PENERBITAN INTERNAL

Pemenang	Penerbitan Internal
1	Pemerintah Kabupaten Bogor
2	Pemerintah Kota Pangkal
3	Pemerintah Kota Pontianak

KEMENTERIAN LPNK & PTN

Pemenang	Laporan Kerja Humas
1	Universitas Brastani
2	Kementerian Dalam
3	Koramil Pembangunan Kupang

Pemenang	Penerbitan Internal
1	Kementerian Perindustrian
2	Korwil Pembangunan Kotabumi
3	Kementerian Kesehatan

BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pemenang	Laporan Kerja Humas
1	PT Sawitmas Indonesia
2	Parum Bahutan
3	PT Palabuhan Indonesia III

Pemenang	Penerbitan Internal
1	PT Bina Masini
2	PT Bakumarkas Indonesia
3	PT Jasa Rahayu

PELAYANAN INFORMASI MELALUI INTERNET/WEBSITE

Penda Kabupaten & Propinsi

Pemenang	Pelayanan Informasi Melalui Internet
1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3	Pemerintah Kabupaten Kendal

MERCHANDISE

Pemenang	Merchandise Utama
1	Pemerintah Provinsi Bali
2	Pemerintah Kabupaten Semarang
3	Pemerintah Kota Pagar Alam

KEMENTERIAN LPNK & PTN

Pemenang	Pelayanan Informasi Melalui Internet
1	BeritaSatia Pendidikan
2	Mahkamah Agung RI
3	Universitas Padjadjaran Bandung

Pemenang	Merchandise Utama
1	Angkasa Kelautan Republik Indonesia
2	Universitas Sebelas Maret
3	Kementerian Pekerjaan Umum

BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pemenang	Pelayanan Informasi Melalui Internet
1	PT Palabuhan Indonesia II
2	PT Bina Masini
3	PT Jasa Rahayu

Pemenang	Merchandise Utama
1	PT Pos Indonesia
2	PT Aneka Jember
3	PT PLN

Sumber: Dokumen humas

Pemerintah kabupaten yang berdiri di bawah naungan pemerintah pusat merupakan salah satu institusi yang harus menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 berkaitan dengan pejabat yang berwenang dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Pihak pemerintah dalam pengelolaan konten utama website diwakili oleh bagian hubungan masyarakat yang mempunyai kompetensi dalam bidang jurnalistik, dengan kata lain penyebarluasan informasi publik melalui website adalah salah satu program humas Kabupaten Kendal. Dinas Kominfo adalah pihak penyedia fasilitas website tersebut, sedangkan fungsi utama media website ini adalah sebagai penyebarluasan

informasi melalui update berita yang secara langsung dikelola oleh bagian hubungan masyarakat.

Namun tiga tahun pasca diberikannya penghargaan Anugerah Media Humas, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa fungsi website belum sesuai dengan yang diharapkan oleh publik, selain itu fasilitas komunikasi dua arah antara pihak pemerintah dengan publik belum mampu menggugah partisipasi publik dalam penyampaian informasi.

Portal resmi Kabupaten Kendal hingga 25 November 2015 telah mendapatkan 806.130 pengunjung, sedangkan pada 23, 24, 25 November 2015 telah terjadi kunjungan sebanyak 1430, 1508, dan 1539 kali. Data tersebut menunjukan jumlah angka yang besar, dilihat dari segi banyaknya akses yang dilakukan terhadap website Kabupaten Kendal. Namun terdapat dua kekurangan yang sangat menonjol yaitu dari segi pemanfaatan kolom pengaduan yang ternyata belum mampu meningkatkan jumlah partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, selain itu polling yang dilakukan terhadap kepuasan pengunjung terhadap penyebarluasan informasi melalui website menunjukkan hasil yang tidak bisa dikatakan baik. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1

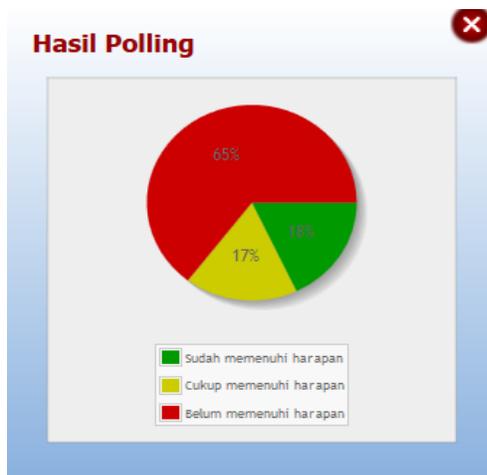
Data tanggapan & keluhan terakhir

No.	Jumlah Kunjungan	Waktu Kunjungan
1	1	Oktober 2014
2	5	Maret 2014
3	3	Januari 2014
4	6	Desember 2013
5	2	November 2013

Sumber: .www.kendalkab.go.id

Gambar 2

Polling kepuasan terhadap informasi web



Sumber: .www.kendalkab.go.id

Gambar 3

Tampilan website pemerintah Kabupaten Kendal



Sumber: www.kendalkab.go.id

Penegasan website Kabupaten Kendal sebagai salah satu sarana untuk berinteraksi dengan publik melalui penyebaran informasi disampaikan oleh Drs. Heri Wasito, yang mengetahui secara langsung pengisian konten website

Website Kabupaten Kendal dengan alamat kendalkab.go.id memang dibikin untuk keperluan penyebaran informasi tentang pembangunan yang ada di Kendal, maupun informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat yang bersumber dari pemerintah Kabupaten Kendal, website itu memang dibikin untuk keperluan penyebaran informasi, disamping juga media-media lain yang kita manfaatkan. (Heri Wasito, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Kendal, wawancara tanggal 11 Januari 2016)

Seiring dengan terus berlangsungnya tahapan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal, maka diperlukan sebuah media publikasi yang secara teratur dapat menyampaikan setiap perkembangan program dan capaian yang telah diraih oleh pemerintah. Kebutuhan masyarakat seputar informasi

perkembangan Kabupaten Kendal dapat secara langsung didapatkan dari sumber yang terpercaya, karena website tersebut secara langsung dikelola oleh pemerintah.

Berdasarkan kutipan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Kendal memanfaatkan berbagai macam media untuk menginformasikan segala bentuk kegiatan dan produk pemerintah kepada khalayak, termasuk penggunaan website sebagai salah satu media terdepan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pemanfaatan website sebagai media penyebarluasan informasi publik humas Kabupaten Kendal tahun 2012-2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pencapaian kontekstual dari pencapaian kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan penjelasan yang mendalam dan mendetail tentang bagaimana pemanfaatan website sebagai media penyebarluasan informasi publik humas Kabupaten Kendal tahun 2012-2015.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan ada manfaat bagi pihak terkait, baik manfaat secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam bidang akademis, referensi bagi peneliti berikutnya berkaitan dengan perkembangan penggunaan website sebagai salah satu media untuk menyebarkan informasi kepada publik dengan biaya yang murah dan akses yang cepat.
- b. Bagi instansi pemerintah terkait, sebagai bahan pertimbangan dalam pemanfaatan internet sebagai media penghubung antara pemerintah dan publiknya melalui website, dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi pemerintah yang berbasis elektronik.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran dan informasi kepada pemerintah Kabupaten Kendal, agar lebih memaksimalkan praktek *e-Government* khususnya melalui penggunaan website sebagai media informasi dan edukasi bagi masyarakat.
- b. Memberikan informasi bagi publik, khususnya masyarakat Kabupaten Kendal untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia dalam rangka membangun Kabupaten Kendal melalui media baru.

- c. Memberikan gambaran bagi individu yang tertarik dengan dunia pemerintah, khususnya keterbukaan informasi publik melalui potret yang terjadi pada website pemerintah Kabupaten Kendal.

E. Kerangka Teori

1. Humas Pemerintah

Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas humas yang terdapat di instansi pemerintahan dengan nonpemerintah adalah tidak adanya unsur komersial, walaupun humas pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi dan periklanan. Humas pemerintah lebih menekankan pada pelayanan publik atau demi meningkatkan pelayanan umum.

Coulin Cuolson dan Thomas (1993:3) menyatakan bahwa menurut lembaga *public relations* di Amerika, *public relations* didefinisikan sebagai “Usaha yang diusahakan secara terus menerus dengan sengaja, guna membangun dan memepertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya”.

Menurut Sam Black (Onong, 1992: 39-40) ada empat tujuan utama humas Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai kebijaksanaan lembaga beserta kegiatannya sehari-hari.

- b. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pandangannya mengenai proyek baru yang penting sebelum lembaga mengambil keputusan.
- c. Memberikan penerangan kepada penduduk mengenai cara pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dan mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka.
- d. Mengembangkan rasa bangga sebagai warga negara.

2. Peran dan Fungsi Humas Pemerintah

Rusady Ruslan dalam bukunya *Etika Kehumasan, Konsepsi dan Aplikasi* (2001: 107-109) menjelaskan bahwa

Peranan humas pemerintah dapat merupakan bagian dari alat atau saluran instansi pemerintah (*the public relations are functional as atools or channels of government publication activity*), yaitu untuk memperlancar proses interaksi positif dan menyebarkan informasi mengenai publikasi pembangunan nasional atau daerah dan provinsi melalui kerja sama dengan pihak media/pers.

Perkembangan peran humas dalam suatu organisasi atau perusahaan, menurut Dozier D. M., (1992) merupakan salah satu kunci untuk memahami fungsi humas, peranan humas dalam organisasi dapat dibagi dalam empat kategori (Betty, 2012: 9-10):

a. Penasehat Ahli

Seorang praktisi humas yang berpengalaman dan berkemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya.

b. Fasilitator Komunikasi

Dalam hal ini, praktisi humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen untuk mendengar apa yang diharapkan dan diinginkan publiknya.

c. Fasilitator Pemecahan Masalah

Peranan praktisi humas dalam proses pemecahan masalah merupakan salah satu fungsi manajemen, hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasehat hingga tindakan mengambil eksekusi dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional.

d. Teknisi Komunikasi

Peranan teknisi komunikasi ini menjadikan praktisi humas sebagai *journalist in resident* yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi.

Menurut Effendy (1992: 37-39) menjelaskan bahwa fungsi humas pemerintah pusat dengan humas pemerintah daerah adalah sama, yang

membedakan adalah ruang lingkupnya, ada dua fungsi utama yang harus dijalankan oleh humas yaitu: pertama, menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijakan, perencanaan, dan hasil yang telah dicapai. Kedua, menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Selain itu humas juga mempunyai keistimewaan dengan wewenang untuk memberikan masukan kepada pimpinan departemen berkaitan dengan reaksi atau tanggapan publik terhadap kebijakan yang dijalankan.

Bonar (1993: 89-91) menambahkan peran humas sebagai lembaga penerangan informasi harus berada dalam “satu bendera”, hal tersebut dengan jelas menggambarkan fungsi penerangan sebagai koordinator seluruh penerangan pemerintah dari semua departemen, segala penyebarluasan informasi yang dikeluarkan pemerintah harus terlebih dahulu diatur secermat-cermatnya dan direncanakan sebaik-baiknya, agar tujuan dan maksudnya dapat segera meresap kepada masyarakat, dan jika suatu departemen hendak mempublikasikan sebuah informasi baik berupa persoalan, penjelasan politik, keterangan teknis dan sebagainya, maka tugas hubungan masyarakatlah yang mengatur bentuk penerbitan atau publikasi yang terbaik.

3. Aktivitas Humas Pemerintah

Aktivitas humas pemerintah adalah berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam usaha sebagai bentuk realisasi dari peran dan fungsi humas, Scoot M. Cutlip dkk. (2006: 468-479) mengemukakan aktifitas humas pemerintah sebagai berikut:

a. Memberi informasi kepada masyarakat

Tugas utama dari humas pemerintah adalah memberikan pelayanan informasi, yaitu memastikan arus informasi kepada orang yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan terutama masyarakat. Tugas penyebaran informasi ini dapat bersifat global ketika informasi harus disampaikan melintasi batas negara.

b. Melibatkan masyarakat dalam program pemerintah

Tanpa adanya warga negara yang aktif dan mempunyai informasi, pejabat pemerintah tidak akan mengetahui kebutuhan dan kepentingan publiknya. Dalam setiap pembuatan kebijakan, secara langsung akan berpengaruh terhadap publik, sehingga publik harus dilibatkan guna meminimalisir kesalahpahaman antara kedua pihak.

c. Membangun dukungan masyarakat

Dalam pemerintahan yang demokratis, setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah harus dilaporkan kepada publiknya, hal ini sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pemerintahan, selain itu pemerintahan yang efektif juga didukung oleh partisipasi masyarakat melalui tanggapan berkaitan dengan informasi yang disebarluaskan pihak pemerintah.

d. Sebagai perantara pemerintah kepada masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan identik dengan birokrasi yang panjang dan rumit yang berpengaruh terhadap kualitas layanannya, salah satu aktifitas humas adalah menjadi jembatan bagi publik untuk terhubung dengan pemerintah, dengan membina hubungan yang baik dengan masyarakat.

e. Mengelola media elektronik dan partisipasi masyarakat

Dalam negara yang menganut azas demokrasi menganggap bahwa informasi berhubungan erat dengan hak asasi manusia, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan informasi mengenai hasil kerja pemerintahnya, Selain itu humas juga mengelola segala bentuk masukan dari masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai media termasuk menggunakan internet, sehingga diperlukan pengelolaan terhadap media tersebut untuk memaksimalkan efektifitasnya.

f. Mengelola informasi internal

Pengelolaan informasi internal merupakan salah satu aktivitas utama humas, walaupun informasi internal adalah hal yang biasa dalam sebuah organisasi, akan tetapi informasi internal dalam pemerintahan adalah sebuah hal yang sangat penting, karena setiap penyebarluasan informasi publik harus dilakukan secepat dan seakurat mungkin, maka dari itu setiap pegawai pemerintahan harus terinformasi terlebih dahulu dan memahami isu yang ada.

g. Memfasilitasi hubungan media

Setiap pemberitaan yang berkaitan dengan pemerintahan akan menjadi sasaran utama para awak media, oleh karena itu membangun hubungan media merupakan salah satu aktivitas utama dari petugas humas. Hal tersebut bertujuan agar pemberitaan yang beredar di masyarakat melalui media massa dapat terkontrol.

4. Media Publikasi Humas Pemerintah

Pemilihan media publikasi baik media konvensional maupun media baru yang sesuai dengan khalayak sasaran sangat penting, publikasi berita atau informasi tanpa pertimbangan pemilihan media, isi redaksional, khalayak dan kebijaksanaan redaksionalnya adalah sebuah hal yang sia-sia, hal tersebut dikarenakan setiap media mempunyai kelompok publiknya masing-masing

(pembaca/pendengar/pemirsa). Selain itu karakter setiap media juga berbeda yang sangat menentukan kelompok publiknya.

Menyadari bahwa potensi yang dimiliki media massa sangat besar untuk penyebarluasan informasi dan berita, maka diperlukan pertimbangan dalam pemilihan media tersebut, agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa media publikasi konvensional yang dapat digunakan oleh humas yaitu (Betty, 2012: 47-49):

a. Surat Kabar

Surat kabar merupakan media publikasi utama yang banyak dibaca orang, mendapat kepercayaan dari pembaca, mempengaruhi opini publik, muncul secara teratur, dan secara intensif meliputi berita-berita lokal dan regional.

b. Majalah

Majalah merupakan salah satu media yang penting untuk mengasikkan ide-ide *feature* dan publisitas bergambar. Majalah akan dibaca dan cenderung akan disimpan sebagai bahan referensi untuk masa yang akan datang.

c. Siaran Radio

Radio mempunyai jangkauan yang luas tanpa terhalang letak geografis suatu daerah dan telah mempunyai publiknya sendiri, siaran radio mempunyai

keunggulan untuk mengutarakan gagasan atau pendapat secara sederhana dan langsung.

d. Siaran Televisi

Televisi adalah salah satu media informasi yang menjadi favorit publik, sehingga sangat efektif untuk penyebaran informasi. Televisi mempunyai cakupan wilayah siaran yang luas ditambah dengan daya tarik audio visual.

e. *Newsletter*

Newsletter adalah bentuk publikasi dari perusahaan yang berisikan informasi khusus yang tidak dapat ditemukan di buku atau media massa umum lainnya.

5. *Electronic Public Relations*

Terus meningkatnya kebutuhan atas informasi dalam kehidupan telah berdampak secara signifikan terhadap cara berkomunikasi manusia, didorong dengan perkembangan teknologi, membuat interaksi manusia tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Imbas dari perkembangan teknologi juga berdampak terhadap pekerjaan pelaku humas, tuntutan publik akan respon yang cepat dari setiap perubahan dan kebutuhan informasi yang *up to date* menuntut humas untuk menyesuaikan diri. Pesan yang disampaikan oleh humas tidak hanya melalui media konvensional, melainkan melalui semua media dengan transfer

yang sangat cepat seperti internet. Hal tersebut menimbulkan suatu pendekatan baru dalam pekerjaan humas yang disebut dengan E-PR (*Electronic Public Relations*)

Electronic Public Relations jika didefinisikan berdasarkan penggalan katanya yaitu, *Electronic* yang mengacu pada media elektronik internet, *Public* mengacu pada masyarakat atau pasar konsumen, dan *Relations* yang berarti hubungan. Secara keseluruhan E-PR didefinisikan sebagai inisiatif *public relations* yang menggunakan media internet sebagai sarana publikasinya (Ongo, 2004: 1-2)

Jika humas konvensional memerlukan mediator dalam dalam penyampaian pesan pada publiknya, berbeda dengan E-PR yang tidak memerlukan mediator, selain itu E-PR juga memiliki kelebihan sebagai berikut (Betty, 2012: 64-64):

- a. Jangkauan luas
- b. Informasi dapat diakses 24 jam
- c. Interaktif
- d. Respon cepat
- e. Banyak tersedia informasi
- f. Informasi selalu *up to date* dan aktual

- g. Materi mudah diperbarui
- h. Biaya murah
- i. Kontak dengan media mudah dilakukan

Berdasarkan kelebihan yang telah dijelaskan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pelaku humas dengan menggunakan media internet (Betty, 2012: 65-66):

a. Publikasi

Humas dapat melakukan publikasi tentang perusahaan/instansi atau tentang produk dan jasa yang dihasilkan perusahaannya melalui internet.

b. *Media Relations*

Hubungan dengan media dapat dilakukan melalui internet. Bahkan dapat dikatakan internet sangat membantu dan mempermudah hubungan dengan media.

c. Mencari informasi yang *up to date*

Segala bentuk informasi dapat dicari menggunakan internet, informasi yang disediakan internet adalah informasi sepanjang jaman dan informasi yang paling *up to date*.

Berbagai macam fasilitas tersedia dalam internet, hal ini jelas sangat membantu kerja humas, setiap fasilitas yang tersedia dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, fasilitas tersebut adalah (Betty, 2012: 67-70):

- a. *E-mail*
- b. *Chat*
- c. *Mailling list*
- d. *Newsgroup*
- e. *E-Newsletter*
- f. Layanan Jaringan Internet
- g. *Media Relations*
- h. *World wide web (Website)*

Pemanfaatan internet di lingkungan pemerintah daerah untuk mendukung berbagai macam aktifitas pemerintahan kini telah berkembang dengan sangat pesat, berbagai macam pilihan fasilitas telah banyak digunakan termasuk website. Sarana website sebagai bagian dari internet pada hakikatnya merupakan sebuah model komunikasi, seiring dengan perkembangan dan inovasi yang terus muncul, membuat penggunaan dan pemanfaatan website semakin masif karena kemudahan operasionalnya.

Definisi situs website menurut Supriyanto adalah sebuah koleksi dokumen-dokumen multimedia yang saling terhubung dan diakses melalui jaringan internet menggunakan protokol *http* (Ana dkk, 2014: 148)

Website adalah sarana terpopuler yang dicari individu ketika hendak mencari informasi tentang sebuah organisasi atau instansi. Oleh sebab itu setiap organisasi maupun instansi harus melengkapi sarana komunikasinya dengan website. Website telah bertransformasi menjadi sebuah wajah bagi organisasi maupun instansi, bahkan bagi sebagian organisasi website adalah sebuah rumah “virtual” dimana publiknya dapat merasakan alamat website senyata alamat aslinya (Rachmat, 2008: 260-263).

Agar website bermanfaat dengan baik, maka diperlukan pengelolaan yang baik. Louis K. Falk memberikan beberapa tips seputar pengelolaan website melalui enam aturan, yaitu:

- a. Setiap link yang ditawarkan harus *online (no dead links)*

Link yang tidak aktif dan terjadi terus-menerus akan mengecewakan para pengunjung website yang berimbas pada jatuhnya kepercayaan publik.

- b. Tersedia kontak informasi (*contact information*)

Ketersediaan kontak informasi sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi yang lebih, menjadi salah satu indikator profesionalisme sebuah organisasi.

c. Penataan penempatan informasi (*Placement of Information*)

Kebiasaan membaca dari kiri ke kanan menjadi salah satu pertimbangan dalam penataan konten website, maka dari itu informasi yang lebih penting normalnya ditempatkan di sebelah kiri agar mendapatkan perhatian dari pengakses.

d. Pewarnaan (*Use of Color*)

Penggunaan warna selain agar informasi semakin mudah dibaca juga bertujuan untuk menambah daya tarik website, dengan catatan pemilihan warna tidak mengganggu upaya membaca informasi.

e. Mudah penggunaan

Informasi dalam website mesti siap tersedia dan ditempatkan dalam urutan logis, *Hyperlink* harus akurat dan ditandai secara jelas. Setiap level dalam website seharusnya memungkinkan pengakses untuk kembali lagi pada level sebelumnya dan melangkah ke level selanjutnya (*previous & forwar level*). Link menuju *homepage* juga harus tersedia guna mempermudah pengakses.

f. Bertujuan

Tujuan website akan menentukan kualitas dan tipe informasi di dalamnya. Website dibagi menjadi tiga kategori:

- 1) *Presence model*, digunakan untuk alat promosi
- 2) *Informational model*, dipenuhi dengan beragam materi pesan, termasuk informasi untuk pers.
- 3) *E-commerce model*, didesain untuk menciptakan dan menjaga penjualan.

Dalam sebuah website yang baik terdapat beberapa hal-hal yang harus dipenuhi baik dari segi desain, navigasi maupun konten yang ada di dalam website tersebut. Menurut Ajen Dianawati dalam skripsi Citra Paramita (2011: 20) website yang baik perlu memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Isi

Kemampuan menulis sangat dibutuhkan dalam pengisian konten website, jika diperlukan tambahkan gambar pendukung yang relevan. Kelengkapan isi website yang didukung dengan informasi yang selalu diperbarui akan menunjukkan profesionalitas pengelola website.

b. Struktur Menu

Perancangan menu digunakan sebagai navigator yang akan mengelompokkan konten website, sehingga akan memudahkan penggunaan website.

c. Desain dan Layout website Semenarik Mungkin

Desain dan Layout website adalah suatu aspek pendukung dalam pemanfaatan sebuah media website, desain dan layout yang menarik akan membuat pengunjung tertarik untuk membuka website tersebut di masa yang akan datang.

d. Proses *Loading* Harus Cepat

Kelengkapan isi dan desai website yang menarik tidak akan bermanfaat jika loading website berjalan website, kecepatan akses adalah faktor yang menunjang kepuasan pengunjung.

e. Teknologi Website dan *Software* Tambahan

Website harus menyediakan fasilitas file yang dapat diunduh untuk memudahkan para pengunjung mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Menurut Ana dkk. dalam bukunya *Demokrasi Ber-media Online* (2014: 146-148) untuk menentukan ragam konten yang diklasifikasikan sebagai informasi, merujuk pada Panduan Standar Konten minimal situs website pemerintah yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, panduan tersebut mengamanatkan kriteria standar yang disarankan untuk situs website pemerintah yaitu:

- a. Selayang Pandang
- b. Pemerintahan Daerah
- c. Geografi
- d. Peta Wilayah dan Sumber Daya
- e. Peraturan/Kebijakan Daerah dan Berita
- f. Forum Diskusi dan Saran/Komentar

Menurut Schumann, Artis, dan Rivera, interaktivitas yang ada pada situs website sebagai fasilitas internet tidak dimaknai sebagai karakteristik media, tetapi merupakan karakteristik pengguna, media hanya memfasilitasi interaksi. Hal ini mengandung arti bahwa aktifitas interaksi yang terjadi tidak secara utuh muncul dari fasilitas yang diberikan situs website, tetapi muncul dari penggunaannya (Ana dkk, 2014: 156).

Dalam tahap ini peran pemerintah selaku pengelola situs website sangat penting, agar tidak hanya sekadar menyediakan fasilitas interaksi melalui website, akan tetapi juga turut mendorong publik untuk turut berpartisipasi dalam ruang interaksi yang telah disediakan.

6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan dua hasil penelitian sejenis yang terfokus pada pemanfaatan website sebagai sebuah media untuk menyebarkan informasi. Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa penelitian tentang pemanfaatan website sebagai media penyebarluasan informasi publik humas Kabupaten Kendal tahun 2012-2015 belum pernah dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Judul : Pemanfaatan Website Sebagai Sarana Pengelolaan Tanggapan dan Keluhan Masyarakat di Kabupaten Sleman

Nama : Nima Hikmawati

Tahun : 2014

Hasil : Sebagai sebuah media untuk membangun komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, website Kabupaten Sleman dapat dikatakan terlambat karena dimulai sejak tahun 2004, namun hal tersebut tidak menghilangkan kredibilitas website sebagai sebuah media informasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan keadaan website yang responsif terhadap keluhan yang disampaikan masyarakat dengan menyediakan website yang mudah dalam segi penggunaannya. Website Kabupaten Sleman

juga tidak terlepas dari permasalahan yaitu dengan adanya pegawai yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya website. Perbedaan

Perbedaan : Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada tujuan penggunaan website, karena pada penelitian ini hanya fokus pada pengelolaan tanggapan dan keluhan. Perbedaan selanjutnya adalah teori yang digunakan hanya tentang media baru. Selain itu teknik pengumpulan datanya juga tidak menggunakan observasi.

2. Judul : Pemanfaatan Website Sebagai Media Promosi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nama : Citra Paramita

Tahun : 2011

Hasil : Penggunaan website sebagai media promosi UMY dinilai sudah cukup baik dengan menggunakan berbagai macam fasilitas dukungan yang dapat meningkatkan nilai promosi, namun website ini juga masih memiliki kekurangan dari segi desain yang masih terlihat sederhana. Selain itu *update* informasi yang dilakukan tiap fakultas tidak merata, hal tersebut tentu akan berpengaruh juga terhadap hasil promosi.

Perbedaan : Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tujuannya yaitu hanya terbatas sebagai media promosi. Selain itu lokasi dan waktu penelitian juga jauh berbeda yaitu pada tahun 2011.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi secara tepat dan terperinci mengenai bagaimana pemanfaatan website sebagai media penyebarluasan informasi publik humas Kabupaten Kendal tahun 2012-2015.

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2001: 3) mendefinisikan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Data yang didapatkan dari penelitian yang menggunakan metode deskriptif berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian maka hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan-lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2001: 6).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2015 hingga Maret 2016. Penelitian dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, dan terfokus pada bagian Hubungan Masyarakat dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Teknik Pengambilan Informan

Teknik pengambilan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan sebuah pertimbangan yang mempunyai sebuah tujuan tertentu (Sugiyono, 2005: 53-54)

Dalam penelitian ini ada beberapa informan yang akan dijadikan sumber data melalui wawancara, yaitu kepala humas Kabupaten Kendal, kepala sub bagian media massa, kepala Seksi Aplikasi dan Telematika Dinas Kominfo Kabupaten Kendal, Dan sumber data yang terakhir adalah masyarakat Kabupaten Kendal. Secara lebih detail berikut adalah penjelasan tentang informan-informan tersebut:

1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Kendal

Drs. Heri Wasito

Informan merupakan kepala bagian hubungan masyarakat yang bertanggung jawab dalam penyebarluasan informasi melalui media website.

2. Kepala Sub Bagian Media Massa Setda Kabupaten Kendal

Mokh. Fatkhurahman, SH, ME.

Informan merupakan kepala sub bagian media massa yang secara langsung mengisi konten berita dalam website, dan mengetahui secara pasti informasi apa yang harus dipublikasikan oleh staf-stafnya.

3. Kepala Seksi Aplikasi dan Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal

Heri Aryanto

Informan merupakan kepala Seksi Aplikasi dan Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal yang mengetahui seluk-beluk pengelolaan sarana website sebagai salah satu media penyebarluasan informasi, mulai dari pengadaan website hingga pembagian tugas dalam pemanfaatan website tersebut.

4. Masyarakat Kabupaten Kendal yang mempunyai akses internet

Muhammad Arif Prayoga

Informan merupakan masyarakat Kabupaten Kendal yang memiliki akses internet dan menjadi sasaran penyebarluasan informasi melalui media website.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Terfokus

Pada tahap ini peneliti melakukan *mini tour observation*, yaitu suatu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu (Sugiyono, 2005: 70). Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap website Kabupaten Kendal beserta pengelolaanya pada tahun 2015.

b. Wawancara

Menurut Rachmat Kriyantono wawancara adalah percakapan antara periset (seseorang yang berharap mendapatkan informasi) dan informan (seseorang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek) (Berger, 2000: 11)

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara semistruktur (*semistructured interview*). Dalam wawancara semistruktur ini, pewawancara mempunyai daftar pertanyaan tertulis, namun juga memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara bebas yang terkait dengan permasalahan (Rachmat, 2006: 99)

Wawancara dalam penelitian ini akan ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan website www.kendalkab.go.id, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika selaku

penyedia sarana berupa website dan bagian hubungan masyarakat selaku bagian yang mempunyai wewenang dalam penyebarluasan informasi melalui website, serta masyarakat Kabupaten Kendal yang mempunyai akses internet sebagai target sasaran penyebarluasan informasi melalui website.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni dan dan karya pikir. Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif adalah pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yang ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan serta pembuktian suatu kejadian (Satori & Komariah, 2012: 148-149).

Dalam penelitian ini dokumen yang di gunakan adalah histori website dan berkas-berkas yang berhubungan dengan pengelolaan website tahun 2012-2015.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif, selama dan setelah proses wawancara peneliti telah melakukan analisis, namun jika data yang dianalisis terasa belum memuaskan maka peneliti akan mengembangkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu dimana informasi yang didapatkan sudah kredibel. menurut Miles dan Huberman analisis interaktif adalah aktifitas analisis yang dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis data ini yaitu (Sugiyono, 2005: 91-99).

a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui teknik-teknik yang sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui kata-kata & tindakan, sumber tertulis, foto, data statistik, dan wawancara.

b. Reduksi Data

Data yang didapatkan dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Informasi-informasi yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui teknik reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih

jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dituliskan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Penyajian data berfungsi untuk mengorganisasikan data, sehingga data tersusun rapi dan mudah difahami, agar dapat digunakan untuk merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan hal yang telah difahami tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

6. Validitas Data

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2005: 125).

Lebih spesifik teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber, menurut Patton, triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Teknik triangulasi sumber ini dapat dilakukan dengan cara (Moleong, 2001:178):

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini data yang didapatkan dari wawancara akan dibandingkan dengan data yang diambil dari hasil pengamatan dan isi dokumen yang berkaitan dengan penelitian, sehingga data yang didapatkan akurat dan dapat dipercaya, serta agar ada keseimbangan dari data yang satu dengan data yang lain.

7. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang isi dari penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian yang akan menjelaskan perihal apa saja yang akan dibahas dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan alasan pengambilan judul penelitian ini, informasi yang tercantum dalam bab ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab dua akan membahas tentang informasi tentang Kabupaten Kendal pada umumnya dan humas serta Dinas Kominfo pada khususnya, informasi tersebut meliputi sejarah, visi dan misi, tugas pokok & fungsi serta struktur organisasi.

BAB III SAJIAN DATA DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan dilakukan pemaparan tentang pengelolaan website milik pemerintah Kabupaten Kendal yang dimanfaatkan sebagai salah satu media untuk mempublikasikan setiap informasi yang berhubungan dengan pemerintahan, pemaparan informasi tersebut akan menjelaskan mulai dari

pengadaan website, pembagian tugas pengisian konten website, serta proses publikasi melalui website.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir dari penelitian ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, selain itu peneliti juga menuliskan saran yang ditujukan bagi pengelolaan website Kabupaten Kendal.